

BAB II

KEMILITERAN DI INDONESIA

Pasca-proklamasi kemerdekaan dikumandangkan, masih terdapat berbagai permasalahan yang jika tidak cepat untuk diselesaikan dapat mengganggu eksistensi sebagai negara yang telah merdeka. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari dalam tetapi juga dari luar seperti keberadaan sisa pasukan Jepang dan kedatangan pasukan sekutu yang memboncengi NICA. Rakyat telah mengetahui motif atau tujuan utama pasukan Belanda (NICA) yang ikut serta dengan pasukan sekutu ke Indonesia, berusaha melakukan berbagai perlawanan. Perlawanan yang dilakukan secara serempak oleh rakyat diberbagai daerah di Indonesia untuk menentang kedatangan bangsa asing yang dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara. Pemerintah telah memutuskan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi akibat dari kedatangan bangsa asing (NICA) melalui dua cara antara lain yaitu diplomasi dan militer.

Cara diplomasi atau perundingan selalu diupayakan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan kolonial Belanda. Diplomasi atau perundingan yang pernah disepakati oleh kedua belah pihak antara pemerintahan Indonesia dengan Pemerintahan kolonial Belanda untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti perundingan Linggarjati, perundingan Renville, perundingan Reom-Roijen dan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB). Bila melalui cara diplomasi

tidak juga dapat menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut, pemerintah akan melakukan upaya penyelesaian melalui cara militer yaitu peperangan.

Pemerintah menyadari akan pentingnya organisasi tentara kebangsaan yang dapat melindungi bangsa dan negara dari berbagai gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan hasil dari proses panjang bangsa Indonesia dalam pembentukan organisasi tentara kebangsaan. Langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk membentuk organisasi tentara kebangsaan yaitu mendirikan secara resmi Badan Keamanan Rakyat (BKR). Jika dilihat dari tugas dan fungsi Badan Keamanan Rakyat (BKR) itu sendiri belum dapat dianggap sebagai suatu organisasi tentara kebangsaan. Walaupun tidak memenuhi kriteria-kriteria untuk dianggap sebagai suatu organisasi tentara kebangsaan tetapi Badan Keamanan Rakyat (BKR) merupakan penggerak revolusi.

Pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah secara resmi membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat dianggap sebagai kelahiran organisasi tentara kebangsaan. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terus mengalami proses penyempurnaan untuk menjadi suatu organisasi tentara kebangsaan yang dapat dilihat saat ini. Proses penyempurnaan dimulai dari perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat, nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak berlangsung dalam waktu yang lama kemudian diganti menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI), penyempurnaan yang terakhir yakni menyatukan antara tentara reguler (anggota-anggota TRI) dengan tentara laskar (anggota-anggota badan-badan perjuangan) untuk bernaung

dalam satu wadah organisasi tentara kebangsaan yang bernama Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Organisasi Tentara Kebangsaan (TNI) terdiri dari tiga angkatan bersenjata (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara) dan Kepolisian. Pada tiap-tiap angkatan bersenjata terbagi dalam kesatuan-kesatuan yang memiliki keahlian tertentu seperti Infanteri (Kostrad dan Kopassus), Polisi Militer Kavaleri, Artileri Medan, Artileri Pertahanan Udara, Zeni, Peralatan (CPL), Perhubungan (CHB), Ajudan Jenderal (CAJ), Pembekalan Angkutan (CBA), Topografi (CTP), Kesehatan Militer (CKM), Keuangan (CKU), Hukum (CHK), dan Penerbang (CPN). Sedangkan dalam Kepolisian terbagi berbagai kesatuan antara lain Densus Anti Teror, GEGANA, Badan Reserse dan Kriminal, Badan Intelijen dan Keamanan, Brigade Mobil, Pusat Laboratorium Forensik, National Central Bureau (NCB) Interpol, dan Badan Reserse dan Kriminal.

A. BADAN-BADAN PERJUANGAN

Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyatakan kapitulasi menyerah kalah perang tanpa syarat kepada pihak Sekutu. Para pemuda mendesak agar Ir. Soekarno dan M. Hatta untuk secepatnya memproklamkan kemerdekaan, perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda mengenai kemerdekaan Indonesia, sehingga terjadinya peristiwa Rengasdengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamkan oleh Soekarno-Hatta. Setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, pada tanggal 19 Agustus 1945, Pemerintah Jepang menyatakan bahwa kesatuan-kesatuan angkatan bersenjata buatan Jepang (PETA, Heiho) telah dibubarkan.

Pelucutan senjata serta pembubaran PETA menjadikan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka tidak mempunyai suatu kekuatan untuk mempertahankan diri terhadap lawan dari luar maupun dalam negeri. Melihat kondisi tersebut, para pemuda berinisiatif untuk membentuk badan-badan perjuangan atau laskar. Badan-badan perjuangan adalah organisasi-organisasi yang didirikan secara spontanitas oleh rakyat. Beberapa badan-badan perjuangan bahkan telah berdiri pada masa pendudukan Jepang seperti Hizbullah. Organisasi ini berdiri pada tanggal 2 Desember 1944 oleh pemerintahan Jepang.

Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI melakukan rapat sidang sebanyak tiga kali untuk membentuk dasar pemerintahan Indonesia. Sebagian besar pemuda-pemuda merasa kecewa terhadap PPKI yang menunda pembentukan tentara kebangsaan dan dibentuknya tiga badan perjuangan sebagai wadah bagi aspirasi perjuangan rakyat dalam mengisi kemerdekaan. Perasaan kecewa yang ada didalam diri sebagian pemuda sehingga mereka memutuskan untuk membentuk badan-badan perjuangan. Seluruh daerah di Indonesia sebagian besar memiliki badan-badan perjuangan.

Dalam melakukan aktifitasnya Badan-badan perjuangan bergerak sendiri-sendiri dan juga melakukan kerjasama dengan anggota-anggota BKR untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Badan-badan perjuangan mengalami perkembangan yang cukup besar setelah pemerintah mengizinkan untuk mendirikan partai-partai politik. Hampir setiap partai politik besar mempunyai badan perjuangan yang sudah pasti menganut ideologi partai yang menaunginya. Badan-badan perjuangan tersebut ada yang berkembang menjadi

besar dan memiliki pengaruh dalam perjuangan, dan ada pula yang tidak berumur panjang sehingga bergabung dengan badan perjuangan yang lebih besar. Badan-badan perjuangan menyatakan dirinya merupakan tentara reguler atau masyarakat.

Berdasarkan keanggotaannya badan-badan perjuangan dapat dibedakan atas badan perjuangan yang bersifat etnis, bersifat lingkungan kerja (profesi), bersifat lokal dan bersifat ideologis. Badan-badan perjuangan membentuk satu wadah organisasi gabungan yang dinamakan "Komite Van Aksi". Badan-badan perjuangan yang tergabung dalam Komite Van Aksi antara lain yaitu Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Rakyat Indonesia (BARA), Barisan Buruh Indonesia (BBI), Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I), Angkatan Muda Indonesia (AMI), Pemuda Republik Indonesia (PRI), Barisan Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) dan Pembela Keamanan Rakyat (PKR). Pada tanggal 10 November 1945, Komite Van Aksi menyelenggarakan kongres pertama di Yogyakarta. Kongres tersebut dihadiri oleh 332 orang utusan mewakili 30 organisasi.

B. PEMBENTUKAN BADAN KEAMANAN RAKYAT

Sejak tahun 1944, Jepang semakin terdesak dalam kancah Perang Pasifik. Satu persatu wilayah kekuasaannya berhasil direbut oleh sekutu antara lain Saipan, Irian Timur, Kepulauan Solomon dan Marshall. Dengan keadaan tersebut membuat garis pertahanan Jepang di Pasifik semakin terancam sehingga Perdana Menteri Jepang Koiso Kuniaki menyatakan bahwa suatu saat Indonesia akan diperkenankan merdeka. Pada 1 Maret 1945, pemimpin pemerintah militer Jepang di pulau Jawa Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan pembentukan

Dokuritsu Junbi Cosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas dari badan ini ialah mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting menyangkut segi politik dan ekonomi yang perlu bagi upaya pembentukan Negara Indonesia yang merdeka.

Pengurus BPUPKI terdiri dari seorang *kaico* (ketua), 2 orang *fuku kaico* (ketua muda), dan 60 orang *iin* (anggota). Keanggotaannya juga bukan hanya dalam lingkup bumiputera tetapi juga keturunan Tionghoa, Arab, dan Indo. Pada tanggal 29 April 1945, secara resmi organisasi BPUPKI disahkan, maka ditunjuklah Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua. Setelah sebulan diresmikan, BPUPKI mulai melakukan sidang pertamanya di gedung *Chuo Sangi In* dengan pokok pembicaraan dalam sidang ini merumuskan undang-undang dasar negara. Hasil dari sidang pertama BPUPKI disepakati bahwa dasar negara Indonesia merdeka adalah sistem kekeluargaan atau gotong royong.

Setelah dua hari Jepang menyatakan diri menyerah terhadap Sekutu, pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengadakan sidang rapat yang pertama (I) dengan menghasilkan UUD dan Pancasila sebagai dasar negara, menetapkan Soekarno sebagai Presiden serta Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Pada rapat sidang PPKI yang kedua (19 Agustus 1945) diputuskan untuk segera membentuk tentara kebangsaan. Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melakukan sidang rapat yang ketiga, dengan hasil telah diputuskan untuk membentuk badan organisasi pemerintah yang berfungsi sebagai wadah untuk

menyalurkan potensi aspirasi dan perjuangan rakyat. Badan-badan organisasi tersebut ialah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).

BKR pada awalnya merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). Walaupun Badan Keamanan Rakyat (BKR) sendiri sebenarnya bukanlah suatu badan organisasi tentara kebangsaan tetapi Korps Pejuang Bersenjata. Meskipun begitu, dalam kenyataannya BKR tidak hanya membantu melainkan mempelopori, mendorong dan memutar roda revolusi.

Pada tanggal 23 Agustus 1945, diresmikan pembentukan BKR bersamaan dengan pembentukan KNI dan PNI. Setelah resmi BKR dibentuk, dalam pidato pertama Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas Peta, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam BKR dan bersiap-siap pada saat nanti untuk dipanggil sebagai prajurit tentara kebangsaan jika telah tiba waktunya. Dengan antusiasnya rakyat menerjemahkan pidato tersebut, dalam waktu kurang lebih dua minggu BKR-BKR telah berdiri di berbagai daerah dan telah menjelma menjadi badan-badan revolusi yang memimpin perebutan kekuasaan dan perlengkapan senjata Jepang.

Anggota Badan Keamanan Rakyat (BKR) terdiri dari bekas tentara PETA (Pembela Tanah Air), Heiho, Kaigun Heiho, bekas anggota *Koninklijke Marine* (KM), bekas badan penerbangan Belanda (*ML, MLD, dan VVC*) dan bekas kesatuan penerbangan Jepang (*Rikugun Koku Butai, Kaigun Koku Butai dan*

Nanpo Koku Kabusyiki) maka dari itu BKR mempunyai unsur darat, laut dan udara. BKR unsur darat maupun laut memiliki wilayah jangkauan tugas masing-masing. Untuk BKR unsur darat wilayah jangkauan tugasnya meliputi ibukota provinsi, daerah karesidenan, kabupaten, sedangkan untuk BKR unsur laut wilayah jangkauan tugas berada di daerah-daerah yang memiliki pelabuhan besar seperti Cirebon dan Surabaya.

C. PEMBENTUKAN ORGANISASI TENTARA KEBANGSAAN

1. Tentara Keamanan Rakyat (TKR)

Fungsi dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) tidak optimal, hal ini dikarenakan adanya badan perjuangan lain diluar badan organisasi yang didirikan oleh pemerintah. Sedangkan keadaan situasi keamanan di dalam negeri sudah sangat gawat, karena hampir diseluruh kota besar terjadi pertempuran baik melawan Jepang maupun Sekutu dan *Nederland-Indie Civil Administratie* (NICA). Perlawanan dan perebutan kekuasaan yang dilakukan secara spontan oleh segenap rakyat Indonesia dengan tanpa adanya komando terpusat yang memimpin dan memberikan arahan tentang taktik atau strategi perang. Hal ini membuat perlawanan tersebut tidak efisien sehingga mengakibatkan banyaknya rakyat yang menjadi korban dalam peperangan tersebut. Dalam kondisi yang sudah terdesak pemerintah baru mengambil tindakan untuk mendirikan suatu badan institusi resmi tentara kebangsaan.

Pemerintah mengeluarkan Maklumat resmi mengenai pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, isi dari Maklumat Pemerintah “Untuk

memperkuat perasaan keamanan umum maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat”. Tentara Keamanan Rakyat (TKR) mempunyai tugas pokok yaitu menjaga keamanan dalam negeri. Pemerintah memanggil mantan KNIL Mayor Oerip Soemohardjo ke Jakarta, tujuan pemanggilan tersebut yakni pemerintah menugaskan Oerip Soemohardjo untuk membentuk suatu struktur dalam tubuh TKR secara terorganisir seperti menetapkan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR), perekrutan keanggotaan TKR dan kepemimpinan TKR di daerah-daerah.

Pada tanggal 9 Oktober 1945, pemerintah melalui Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mengeluarkan seruan Mobilisasi TKR “Pemerintah telah membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) sebagai organisasi tentara kebangsaan, keanggotaan TKR terdiri atas rakyat Indonesia yang ingin mengabdikan dirinya sebagai prajurit yang dapat menjaga keamanan bangsa dan negara”.

Pada tanggal 20 Oktober 1945, Pemerintah mengumumkan Susunan dalam Kementerian Keamanan Rakyat. Alasan pemerintah mengangkat Supriyadi sebagai pimpinan tertinggi TKR memiliki tujuan membangkitkan efek psikologis terhadap jiwa seseorang untuk menengok kembali peristiwa pemberontakan PETA di Blitar yang dipimpin oleh Supriyadi, dimana pemberontakan tersebut terjadi karena nasionalisme seseorang tergugah ketika melihat penderitaan sesamanya. Markas

Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR) didirikan di daerah Yogyakarta oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo.

Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo Sebagai Kepala Staf Umum TKR memiliki tugas membuat Susunan Organisasi dalam Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan fungsi yang ada didalam Susunan Organisasi MT-TKR yaitu melalui Kementerian Pertahanan mengeluarkan instruksi yang menyatakan bahwa diperlukan kerja sama antara Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR) dengan badan-badan organisasi tertentu yang terdapat didalam departemen-departemen pemerintahan.

Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo membuat perencanaan struktur pengorganisasian Keanggotaan TKR, mendirikan empat komandemen yang terdiri tiga divisi di Jawa dan satu divisi di Sumatera. Tetapi perencanaan tersebut tidak terlaksana karena kenyataan kondisi di lapangan (daerah-daerah) jumlah rakyat yang berpartisipasi dengan sukarela untuk mendaftarkan diri menjadi anggota TKR melebihi jumlah awal yang diperkirakan.

Melihat kondisi kenyataan yang ada, sehingga Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR) memutuskan bahwa susunan pengorganisasian keanggotaan TKR yang terbagi dalam sepuluh divisi di Jawa dan enam divisi di Sumatera. Walaupun demikian Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR) kembali melakukan pengetatan

organisasi dengan membagi sepuluh divisi yang ada di Jawa kedalam tiga komandemen sedangkan enam divisi yang ada di Sumatera kedalam satu komandemen.

Situasi negara berada dalam kondisi mencemaskan karena pasukan Sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota besar dengan kekuatan tiga divisi tentara Inggris, dua divisi tentara Australia dan beberapa batalyon tentara belanda. Kepala Staf Umum, Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat (MT-TKR) Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo mengeluarkan instruksi agar para anggota TKR mengambilalih kedudukan dan jabatan polisi dan pamong praja untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam struktur kepemimpinan MT-TKR terdapat kekurangan yaitu sejak pemerintah menetapkan Supriyadi sebagai pemimpin tertinggi MT-TKR, tetapi hingga November 1945 Supriyadi tidak pernah menampakkan dirinya sama sekali sehingga selama ini tugas sebagai pemimpin tertinggi TKR diambilalih oleh Oerip Soemoradjo.

Kekosongan yang ada pada jabatan pemimpin tertinggi TKR, menyebabkan kondisi anggota TKR yang tidak memiliki komando terpusat sehingga kadang sering terjadi perselisihan dalam tubuh TKR. Dengan ini maka MT-TKR berinisistif untuk mengangkat seseorang pimpinan tertinggi yang real dapat diajak berkerja sama untuk mengatasi keadaan darurat di dalam negeri. Tanggal 12 November 1945, dilangsungkan rapat akbar TKR di Yogyakarta yang dipimpin oleh Kepala Staf Umum Letnan Jenderal Oerip Soemahardjo dengan agenda acara pemilihan Pimpinan

Tertinggi TKR dan Menteri Pertahanan. Rapat ini dihadiri oleh para perwira senior dalam MT-TKR, panglima-panglima divisi dan komandan-komandan resimen dari pulau Jawa (kecuali Surabaya) sedangkan anggota TKR di Sumatera dan daerah-daerah lainnya tidak mengirimkan utusan sebab kesukaran dalam hal komunikasi.

Dalam rapat besar tersebut, hasil yang diputuskan yaitu bahwa Kolonel Soedirman, Panglima Divisi V/Banyumas terpilih sebagai pemimpin tertinggi TKR sedangkan Oerip Soemohardjo tetap menjadi Kepala Staf TKR, dan Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Setelah rapat dalam membahas kepemimpinan dalam tubuh TKR maka dilanjutkan kembali rapat dengan agenda pembahasan tentang untuk dibentuk badan pendidikan tentara. Setelah diadakannya rapat besar dari kalangan petinggi TKR yang secara kasar belum terbagi dalam bagian-bagian tertentu, mereka semua masih tergabung dalam unsur TKR Darat.

Baru pada tanggal 15 November 1945 secara resmi TKR Laut didirikan dan M. Pardi ditetapkan sebagai Kepala Staf Umum dengan pangkat Laksamana III. Setelah pengangkatannya, Markas Tertinggi TKR Laut, mengeluarkan pengumuman yang berisi untuk mengajak semua pelaut, bekas Kaigun Heiho, dan Marinir agar bersedia berjuang membela negara Republik Indonesia dengan cara mendaftarkan diri ke tempat-tempat yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah. TKR Laut pun memiliki divisi-divisi tertentu.

Markas Tertinggi TKR pada tanggal 12 Desember 1945 mengeluarkan pengumuman yang berisi tentang secara resmi dibentuknya TKR bagian penerbangan (TKR Udara). Markas Tertinggi TKR juga mengangkat Komodor Udara Soerjadarma sebagai Kepala TKR bagian penerbangan dan Soekarmen Martodisoemo sebagai wakilnya. Tugas dari TKR bagian penerbangan yaitu memperbaiki beberapa pesawat terbang yang sudah tua peninggalan tentara Jepang.

Secara resmi pada tanggal 18 Desember 1945, Kolonel Soedirman dilantik oleh pemerintah menjadi panglima TKR dengan pangkat Jenderal. Pada tanggal 24 Januari 1946, maka direalisasikan keputusan untuk membentuk sebuah komisi yang bertugas menetapkan pola dasar tentang pendidikan tentara. Namun pola badan pendidikan tersebut disesuaikan dengan konsepsi Amir Sjarifuddin.

Pemerintah melakukan kembali perubahan nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR), dengan tujuan memperluas tugas tentara. Perubahan nama ini baru disahkan oleh pemerintah pada tanggal 7 Januari 1946, dengan dikeluarkannya Penetapan Pemerintah No. 2/SD 1946. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1946, Markas Tertinggi TKR mengumumkan bahwa “Tentara Keamanan Rakyat diganti dengan nama Tentara Keselamatan Rakyat”.

2. Tentara Republik Indonesia (TRI)

Nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak bertahan lama sebab pada tanggal 26 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan tentang penggantian nama dari Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Dengan adanya penggantian nama tersebut, bertujuan untuk memperbaiki susunan atas dasar dan bentuk ketentaraan Indonesia yang berpedoman pada dasar-dasar Militer Internasional.

Pemerintah bermaksud membentuk tentara yang sempurna dengan menerapkan peraturan militer yang berlaku di negara-negara maju. Untuk dapat mewujudkan isi dari ketetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut, maka pada tanggal 23 Februari 1946, dikeluarkan kembali penetapan presiden untuk membentuk Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo serta dibantu oleh Komodor Udara Soerjadarma, Mayor Jenderal Didi Kartasasmita, Mayor Jenderal drg. Moestopo, Kolonel Soetirto, Kolonel Soendjojo, Kolonel Holand Iskandar, Mayor Simatoepang, Prof. Soepomo dan Prof. Roosseno.

Pada tanggal 17 Mei 1946, diumumkan hasil kerja Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Usaha untuk menyempurnakan struktur organisasi dan personalia dengan dibentuknya Panitia Besar Reorganisasi Tentara. Panitia ini mengadakan sidang pada tanggal 23 Mei 1946 dan tanggal 1946. Sidang ini dihadiri oleh komandan-komandan divisi, resimen dan pengurus-pengurus laskar atau badan perjuangan. Hal

yang menjadi sasaran utama pembahasan yang di laksanakan dalam acara sidang yaitu mengurangi jumlah divisi di pulau Jawa dan memilih ulang komandan divisi yang akan menjadi penanggung jawab dari divisi-divisi tersebut. Pengurangan jumlah divisi untuk di Jawa semula 10 divisi lalu menjadi 7 divisi, sedangkan untuk Sumatera semula 6 divisi menjadi 3 divisi.

Pada tanggal 25 Mei 1946, presiden melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Panglima Besar Jenderal Soedirman atas nama semua yang dilantik mengucapkan sumpahnya di hadapan presiden. Kemudian setelah pengucapan sumpah, diumumkan susunan Markas Besar Umum Tentara dan Kementerian Pertahanan Bagian Militer.

3. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Usaha-usaha pemerintah untuk menyempurnakan tentara kebangsaan berjalan terus, walaupun dalam kondisi bertempur serta berjuang untuk menegakkan kedaulatan serta kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentara pasukan bersenjata yang berjuang terdiri dari dua pasukan yang berbeda yaitu Tentara Republik Indonesia (TRI) sebagai tentara reguler dan badan-badan perjuangan sebagai kekuatan bersenjata rakyat (partisan).

Pasukan bersenjata dari badan-badan perjuangan merupakan pejuang yang tidak mahir dalam menggunakan persenjataan, tidak memiliki pengalaman tentang medan tempuran, dan kadang badan-badan perjuangan

ini ditunggangi oleh partai politik tertentu. Hal inilah yang menyebabkan selalu adanya kesalahpahaman antara kekuatan bersenjata resmi pemerintah dengan badan-badan perjuangan atau laskar sehingga bila terus menerus terjadi sangat tidak menguntungkan perjuangan yang sedang berlangsung di Indonesia maka dengan itu pemerintah berusaha untuk menyatukan semuanya dalam suatu badan organisasi yang mengurus keamanan negara secara resmi.

Pada tanggal 15 Mei 1947, Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan pasukan dari badan-badan perjuangan dalam satu wadah organisasi tentara. Untuk merealisasikan penyatuan tersebut maka dibentuklah panitia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno, dibantu oleh Wakil Presiden Moh. Hatta, Menteri Pertahanan Amir Syarifuddin dan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Panitia ini memiliki anggota yang bertugas melakukan pengawasan secara langsung terdiri atas Kepala Staf Umum Markas Besar Tentara (MBT) Oerip Soemohardjo, Kepala Staf TRI Angkatan Udara Komodor Suryadarma, serta perwakilan dari beberapa badan-badan perjuangan. Proses penyatuan tersebut tidak berjalan dengan lancar, hal ini disebabkan karena partai-partai politik yang menunggangi badan-badan perjuangan tidak bersedia menyerahkan pasukannya terhadap pemerintah.

Menteri Pertahanan menyampaikan idenya mengenai konsepsi pelaksanaan penyatuan secara bertahap. Maksud dari konsepsi pelaksanaan penyatuan dilakukan secara dua tahap. Pada tahap pertama, pasukan

badan-badan perjuangan di daerah divisi diperbolehkan mempunyai satu resimen dari masing-masing partai politik. Resimen-resimen itu kemudian digabungkan menjadi satu brigade laskar lalu pada tahap kedua, brigade laskar menggabungkan diri kedalam tubuh TRI kemudian dilebur menjadi TNI. Konsepsi pelaksanaan penyatuan secara bertahap tersebut disetujui oleh badan-badan perjuangan. Setelah itu panitia bekerja beberapa minggu akhirnya tercapai kesepakatan bahwa TNI akan dipimpin secara bersama dalam wadah pucuk pimpinan TNI.

Pada Tahun 1949-1956 merupakan periode Demokrasi Konstitusional, dimana saat janji-janji revolusi yang diharapkan dapat terwujud akan tetapi kembali pemerintah mengalami kegagalan. Para prajurit TNI berasal dari semua lapisan masyarakat seperti pelajar, pedagang, pendidik, cendekiawan atau intelektual, dan lain-lain. Mereka semua berjuang untuk menegakkan identitas atau jatidiri sebagai tentara kebangsaan. Pemimpin TNI berinisiatif untuk membentuk suatu kelompok kerja untuk merumuskan bentuk jatidiri TNI. Hampir setahun kelompok ini bekerja keras untuk merumuskan tujuh (7) butir jatidiri TNI yang lebih dikenal dengan sebutan SAPTAMARGA. SAPTAMARGA memiliki arti tujuh jalan, dalam hal ini SAPTAMARGA merupakan bagian dari hakekat TNI setelah delapan (8) sikap wajib yang harus dimiliki seorang prajurit dan sebelas (11) asas kepemimpinan ABRI. Pada tanggal 5 Oktober 1951, SAPTAMARGA diresmikan sebagai kode etik TNI.

Menjelang tahun 1956 konsensus telah hampir sepenuhnya dihancurkan. konflik di kalangan elite politik telah sampai memacetkan pemerintahan, berkembangnya birokrasi sipil dan tentara sehingga efektivitas badan-badan ini sebagai instrumen kontrol yang melahirkan sifat otoriter. Masa konstitusi RIS (1949-1950) dan UUD Sementara Republik Indonesia (1950-1959) yang menyatakan bahwa peran sospol ABRI sebagai inkonstitusional dimana pengaturan negara berada di bawah supremasi sipil. Landasan konstitusional yang memuat peranan ABRI di bidang nonmiliter yaitu terdapat pada pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan.

Tahun 1952-1953 memperlihatkan melemahnya Hatta dan orang-orang lain yang serupa dengan pandangannya, dan bersamaan itu terjadinya kebangkitan kekuatan Presiden Soekarno dan kelompok-kelompok nasionalis radikal di dalam parta-partai dan Angkatan Darat. kelompok dalam tentara ini memperoleh kemenangan besar sebagai akibat peristiwa 17 Oktober 1952, ketika sekelompok perwira yang pada umumnya berorientasi kepada Hatta mencoba memaksa Soekarno untuk membubarkan parlemen akan tetapi gagal.

Peristiwa yang mengakibatkan keretakan di lingkungan TNI AD tersebut dapat terselesaikan pada bulan Februari 1955, dengan adanya

rapat para petinggi TNI yang dikenal dengan sebutan Raco (Rapat Colegial). Akan tetapi terjadi kembali pecah belah dalam kubu TNI AD dalam hal pergantian KSAD. Masalah ini lebih dikenal dengan peristiwa Lubis. Di sisi lain, campur tangan politik mendorong TNI untuk terjun dalam kegiatan politik dengan mendirikan partai politik yaitu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) yang ikut sebagai kontestan dalam Pemilihan Umum tahun 1955.

Menjelang pertengahan tahun 1958, ketika pengambilalihan perusahaan Belanda telah dirampungkan dan pemberontakan PRRI telah menurun menjadi kegiatan gerilya maka jalan itu telah bebas dari rintangan untuk terjadinya sebuah tatanan politik yang baru. Presiden Soekarno dan Angkatan Darat bersama-sama telah menghimpun kekuatan yang untuk sementara dapat menegakkan suatu alternatif lain dari Demokrasi Konstitusional. alternatif tersebut yaitu mengubah Demokrasi Konstitusional menjadi Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik yang dipengaruhi secara kritis terutama hubungan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat (dimana terjadi konflik diantara keduanya)

Persoalan hak hukum tentara untuk ikut serta berkuasa dalam urusan sipil merupakan satu bidang persoalan penting yang menjelaskan awal terjadinya konflik antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. setelah semua pemberontakan yang terjadi pada tahun 1958 berhasil dipatahkan, Presiden Soekarno melakukan upaya guna mengurangi

kekuasaan sipil tentara. dalam upaya ini, Presiden mendapat dukungan dari sebagian besar pamong praja. dalam bulan September 1959, Presiden berhasil mengatur kembali sistem Undang-Undang Keadaan Darurat (SOB) itu dengan jalan mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Penguasa Perang Tertinggi (Perperti) sehingga tercipta sebuah kerangka kelembagaan yang menempatkan para Panglima Daerah Militer secara langsung menjadi bawahannya

Oposisi penting pertama datang dari para pemimpin terutama para panglima militer dari sejumlah daerah di luar Jawa. pada paruh kedua tahun 1956, beberapa percobaan kudeta militer yang diatur oleh bekas Pejabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Kolonel Zukifli Lubis yang mendesak agar partai-partai sebaiknya dikubur dan Demokrasi Liberal diganti dengan Demokrasi terpimpin. desember 1956, terjadi kembali pemberontakan terhadap pemerintahan pusat yang terjadi di Sumatera Utara dimana mereka menganggap bahwa Jakarta melakukan sentralisasi yang berlebihan, korupsi dan mengabaikan pembangunan diluar Jawa.

Presiden Soekarno mengembangkan gagasan mengenai Demokrasi Terpimpin yaitu membuat konsep dalam pembentukan kabinet harus berasal dari semua partai besar termasuk PKI, pembentukan Dewan Nasional (sebuah badan penasehat tingkat tinggi yang di dalam badan itu terdapat berbagai golongan fungsional atau karya, buruh, tani, pengusaha, dan lain-lain). pada saat itu terdapat tiga kelompok besar yang bersaing untuk dapat memiliki kekuasaan yaitu kepemimpinan pusat Angkatan

Darat yang berada di bawah pimpinan Mayor Jenderal Nasution (kelompok ini mendapatkan dukungan dari beberapa partai besar seperti Nahdatul Ulama). pada pertengahan Maret, kabinet Ali II mengundurkan diri padahal saat itu keadaan negara dalam kondisi genting. untuk mengatasinya pemerintah beserta pemimpin tentara mengumumkan berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya (Staat van Orlog en Beleg "SOB").

Menjelang pertengahan tahun 1958, ketika pengambilalihan perusahaan Belanda telah dirampungkan dan pemberontakan PRRI telah menurun menjadi kegiatan gerilya maka jalan itu telah bebas dari rintangan untuk terjadinya sebuah tatanan politik yang baru. Presiden Soekarno dan Angkatan Darat bersama-sama telah menghimpun kekuatan yang untuk sementara dapat menegakkan suatu alternatif lain dari Demokrasi Konstitusional. alternatif tersebut yaitu mengubah Demokrasi Konstitusional menjadi Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin dapat dikatakan sebagai suatu sistem politik yang dipengaruhi secara kritis terutama hubungan antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat (dimana terjadi konflik diantara keduanya)

Persoalan hak hukum tentara untuk ikut serta berkuasa dalam urusan sipil merupakan satu bidang persoalan penting yang menjelaskan awal terjadinya konflik antara Presiden Soekarno dan Angkatan Darat. setelah semua pemberontakan yang terjadi pada tahun 1958 berhasil dipatahkan, Presiden Soekarno melakukan upaya guna mengurangi

kekuasaan sipil tentara. dalam upaya ini, Presiden mendapat dukungan dari sebagian besar pamong praja.

Pidato Presiden Soekarno setelah dekrit Presiden (5 Juli 1959) “Penemuan Kembali Revolusi Kita Manifesto Politik Republik Indonesia” menyatakan akan membentuk ABRI yang terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan Kepolisian. Pada bulan September 1959, Presiden berhasil mengatur kembali sistem Undang-Undang Keadaan Darurat (SOB) itu dengan jalan mengangkat dirinya sendiri sebagai Kepala Penguasa Perang Tertinggi (Perperti) sehingga tercipta sebuah kerangka kelembagaan yang menempatkan para Panglima Daerah Militer secara langsung menjadi bawahannya. Tidak lama setelah Presiden Soekarno mengemukakan prinsip perwakilan fungsional, pimpinan Angkatan Darat mengambil alih gagasan tersebut dan mendirikan sejumlah badan kerja sama seperti Badan Kerja Sama Pemuda Militer (BKSPM), Badan Kerja Sama Buruh Militer (BKS Bumil) dan sebagainya. dengan begitu maka organisasi-organisasi massa yang umumnya berorientasi kepada partai-partai politik, kini bersama-sama berada di bawah naungan tentara. kemudian badan-badan kerja sama tersebut digabungkan kedalam Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB).

Penetapan MPRS No.I tahun 1960, ditetapkan sebagai garis-garis besar haluan negara (GBHN). Penetapan Tap MPRS No. II tahun 1960 tentang garis-garis besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1960-1961, pada lampiran A bab III, pasal 51 yang

berbunyi “Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara diikutsertakan didalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanya masing-masing” dan Penetapan Tap MPRS No. III tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara. pada tahun 1961, pimpinan Angkatan Darat membentuk badan organisasi baru yaitu Badan Pembina Karya menggantikan RNPIB maupun badan-badan kerja sama lainnya. Dengan Keppres No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menteri/KASAL, Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusan Veteran dikoordinasikan oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamanan.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Juli 1965, pendidikan AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polri selama satu tahun di Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pengaruh PKI bertambah besar karena politik NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKI mulai menyusupi memengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempat angkatan. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa G30S/PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan SK Presiden No. 132/1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Bidang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU , dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menhankam/Pangab.

Orde Baru hadir sebagai fakta kekuatan yang omnipotent dan omnipresent. militer berfingsi sebagai pertahanan utama yang menjamin survival sebuah bangsa, melindungi keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan warga negara. bahwa setiap negara memerlukan kehadiran angkatan bersenjata yang tangguh dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pertahanan negara.

Pertahanan sebagai konsep yang melegalkan kehadiran militer yang dirumuskan dan diterima sebagai sebuah fungsi sekaligus kawasan monopoli pemerintah nasional. baik dalam tradisi negara feodal maupun dalam tradisi negara kesatuan, fungsi pertahanan adalah fungsi pemerintah nasional yang tidak bisa dijadikan sebagai subyek penyebaran kekuasaan sebagaimana diharuskan dalam prinsip pengaturan politik yang desentralistik. dalam pengaturan fungsi ini, sebagian argumen menyatakan bahwa prinsip setiap sejengkal tanah dan setiap sumber daya yang dimiliki sebuah negara atau bangsa dapat digunakan untuk kepentingan pertahanan apalagi ketika kondisi negara dalam keadaan darurat. Tujuan utama militer adalah untuk membela masyarakat, bukan untuk mendefinisikan masyarakat.¹ pandangan pada tahun 1950an menyatakan bahwa intervensi dan dominasi politik militer merupakan tahapan awal yang kondusif untuk melakukan modernisasi dan pembangunan politik.

¹ Said Salim , *Militer Indonesia dan Politik : Dulu, Kini dan Kelak*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,2001), hal. 10.

ortodoksi yang membenarkan intervensi militer itu didasari oleh pendapat bahwa militer merupakan kekuatan modern yang mampu mengalihkan keterampilan organisasional dan manajerial mereka ke dalam pemerintahan dan administrasi. secara empirik militerisasi dan kebangkitan otoritarianisme di belahan dunia ternyata diikuti dengan kemajuan proses modernisasi ekonomi dan politik sehingga muncul ortodoksi bahwa otoritarianisme adalah pilar yang kokoh bagi stabilitas politik, integrasi nasional dan pembangunan ekonomi yang betcorak kapitalistik pada tahun 1970an ortodoksi mulai kehilangan pengaruh

Masa peralihan dari orde lama ke orde baru, secara jelas dapat dilihat yaitu militer memiliki peranan dalam bidang politik. Keikutsertaan militer dalam politik sudah dimulai sejak pidato Presiden Soekarno, yang berjudul Manifesto Politik, dalam pidato tersebut militer diperbolehkan mempunyai partai. Golongan militer membentuk suatu badan Golongan Karya yang bertujuan untuk bisa mewakilkan golongannya di Parlemen.